

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk)

Oleh:

KETUT SINTA WATI

Banyaknya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan dan tawuran yang disertai membawa senjata tajam berupa Gir menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak serta pengawasan sosial belum berjalan secara optimal. Salah satu contoh perkara Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak? dan apakah putusan pidana nomor 7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Anak terbukti membawa gir motor yang dimodifikasi menjadi senjata berbahaya dan menyadari fungsi serta risiko penggunaannya. Oleh karena itu, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan pembinaan dalam Undang-Undang SPPA. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana antara lain pengaruh lingkungan, pergaulan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum anak mengenai bahaya membawa senjata tajam. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Ketut Sinta Wati

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar penanganan perkara anak yang membawa senjata tajam tanpa hak lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dari pada penghukuman. Peran keluarga dan lingkungan sosial harus diperkuat melalui pengawasan, pendidikan moral, serta dukungan psikologis untuk mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Aparat penegak hukum juga perlu konsisten menerapkan diversi dan keadilan restoratif sebagai langkah utama sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan pendidikan, pembinaan karakter, dan rehabilitasi yang efektif sehingga anak mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana anak, senjata tajam, Undang-Undang SPPA

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF CARRYING A SHARED WEAPON UNAUTHORIZED BY A CHILD (Study of Decision No. 7 Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By

KETUT SINTA WATI

The large number of children involved in violent crimes and brawls accompanied by carrying sharp weapons in the form of Gir shows that legal protection for children and social supervision has not been running optimally. One example of the case is Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk. The research problem is how is the criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights based on Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk and whether the decision is in accordance with the principle of the best interest of the child in the Juvenile Criminal Justice System.

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted through library research and field studies. The sources in this study consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court and Criminal Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis used was qualitative.

The results of the study indicate that The criminal liability of children in the case of carrying sharp weapons without permission based on Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk has fulfilled the elements of actus reus and mens rea as regulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. The child was proven to have carried a motorcycle gear that had been modified into a dangerous weapon and was aware of its function and the risks of its use. Therefore, the child can still was held criminally responsible, but the sanctions imposed were adjusted to the provisions for guidance in the Child Protection and Child Protection Law. Factors influencing the occurrence of criminal acts include environmental influences, peer interactions, lack of parental supervision, and children's low legal awareness of the dangers of carrying sharp weapons. This decision also demonstrates that the judge considered the principle of the child's best interests by imposing a correctional facility (LPKA) that is educational and rehabilitative in nature.

Ketut Sinta Wati

Based on the conclusions outlined, it is recommended that cases involving children carrying sharp weapons without authorization prioritize a guidance approach over punishment. The role of the family and social environment must be strengthened through supervision, moral education, and psychological support to prevent children from engaging in deviant behavior. Law enforcement officials also need to consistently implement diversion and restorative justice as primary measures in accordance with the principle of the child's best interests. Furthermore, the capacity of the Special Child Development Institution (LPKA) must be enhanced to provide effective education, character development, and rehabilitation so that children can improve themselves and return to society successfully.

Keywords: *Criminal liability of children, sharp weapons, SPPA Law.*